

DISSENSUS: UPAYA MENGHADIRKAN PRAKTIK SASTRA DAN BUDAYA YANG DEMOKRATIS

Ghanesya Hari Murti
Sastra Inggris
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember
ghanesyaharimurti@unej.ac.id

Degita Danur Suharsono
Destinasi Pariwisata
Bahasa Komunikasi dan Pariwisata
Politeknik Negeri Jember
danur@polije.ac.id

Article History

Received
25-11-2021

Revised
24-02-2022

Accepted
25-05-2022

Abstrak. Ranciere adalah pemikir politik yang ingin memberikan semangat optimisme dalam kesetaraan berwarganegara. Semangat itu juga digelorkan pada pandangannya tentang demokrasi yang tidak menekankan pada konsensus melainkan dissensus. Artinya, demokrasi lebih ditekankan pada pertentangan dan tidak menjadi sempit pemaknaannya jika hanya menjadi kesepakatan pemenang layaknya jumlah pemilih elektoral terbanyak, karena baginya demokrasi harusnya justru berfokus pada suara yang tidak dimenangkan. Hal tersebut bisa diuji melalui pertanyaan etis mengapa ada suara yang terpinggirkan dan tidak terserap aspirasinya. Langkah tersebut adalah pintu agar kesepakatan, kepatutan dan distribusi peran sosio-budaya selalu transformatif dan dinamis. Dalam karya sastra tentang suara-suara yang dipinggirkan menjadi hal yang penting karena dengan begitu konflik bisa dimainkan dalam alur cerita. Artinya selalu ada nuansa upaya demokratis dalam karya sastra yang menjadi hal penting didalam karya. Di lain sisi ini juga membuktikan bahwa demokrasi memang absolut yaitu tak mungkin ada kemenangan dan kesepakatan satu suara secara total. Sehingga selalu ada alasan mengapa konflik kesepakatan menjadi bumbu dalam dinamika alur sastra dan budaya. Alhasil konsensus pemenang harus diuji ulang melalui dissensus tentang mengapa ketidaksepakatan berpotensi melahirkan dominasi dan distribusi keadilan yang tak merata. Upaya Ranciere dalam melacak ulang seluruh masalah demokrasi tidak hanya dalam dunia politik tapi juga kebudayaan hingga sastra tentunya patut diapresiasi dalam praktik analisis. Tentunya hal ini sesuai dengan semangat mencegah diskriminasi sosial yang turut melanggengkan hirarki sosial baik dalam sasar dan praktik budaya. Alhasil, tulisan ini hendak memberikan kerangka konseptual praktik demokratisasi dalam ruang sastra dan budaya dengan merujuk pemikiran Ranciere demi mencegah karya tidak hanya baik sebagai representasi namun juga membatalkan kebenaran berbasis suara mayoritas yang mendominasi.

Kata Kunci: Dissensus, Sastra, Budaya, Demokrasi, Kesetaraan

Abstract. Ranciere is a political thinker who wants to give a spirit of optimism in citizenship equality. This spirit sparks in his view of democracy which he emphasizes not in consensus but dissensus. This means that democracy focuses more on disagreement rather than agreement of the winner in electoral vote because for him democracy should instead focus on votes that were not won. This is an ethical question why those who are marginalized are not accommodated. Only by dissensus, appropriateness and distribution of socio-cultural roles always be

transformative and dynamic. In literary works, marginalized voices are important because it is locus of conflict. This means that there are undemocratic nuances in literary works which are also the main issue. On the other hand, this also proves that democracy is a struggle that is never final because there is no absolute victory, that is, it is impossible to win votes in total. Hence, there is always a reason why there are votes that are not won? As a result, the consensus of winners is constantly questioned through dissensus since there is disagreement, or reconsideration for the sake of conditions for equitable distribution of justice. Ranciere traces all the problems of democracy not only in the world of politics but also in culture and even literature, which is indeed full of discrimination that perpetuates the social hierarchy. Thus, this paper wants to provide a conceptual framework for democratization practices in the literary and cultural space by referring to Ranciere's thoughts in order to prevent works not only good representations but also questioned majority-based truth.

Keywords: *Dissensus, Sastra, Budaya, Demokrasi, Equality*

PENDAHULUAN

Upaya untuk menjangkar seluruh pemikiran Ranciere nampaknya hanya bisa dilakukan ketika konsepnya tentang *dissensus* dinilai sebagai upaya membaca ulang potensi konsensus yang justru berpeluang untuk mendominasi pemahaman sekaligus merawat arogansi kekuasaan. Bentuk arogansi itu menjelma menjadi aturan sosial, sistem kepatutan, representasi nilai dan norma tentang yang baik dan buruk hingga pada wilayah ekstrem untuk menggangap kelompok tertentu tidak memiliki kecerdasan untuk memahami apa yang terjadi disekitarnya. Tentu saja konsensus tersebut ingin menghadirkan hirarki sosial dimana sistem sosial memberikan jaminan bagi kelompok-kelompok tertentu agar selalu diuntungkan karena memiliki kuasa lebih .

The so-called consensus system is the conjunction of a determined regime of opinion and a determined regime of right, both posited as regimes of the community's identification with itself, with nothing left over. ... It is the absolute removal of the sphere of appearance of the people. In it the community is continually presented to itself. In it the people are never again uneven, uncountable, or unrepresentable. They are always both totally present and totally absent once. They are entirely caught in a structure of the visible where everything is on show and where there is thus no longer any place for appearance (Rancière 1999)

Isi sitiran diatas kurang lebih bisa dimaknai bahwa konsensus bukanlah sekedar kesepakatan tentang kepentingan antar komunitas, namun keadaan dimana terbentuknya opini populer untuk membuat kelompok yang banyak agar selalu diperhitungkan sebagai faktor penentu di dalam tatanan masyarakat. Hal ini penting karena aturan sosial menjadi seolah objektif benar dan tak mungkin bisa dibantah kendati jika digali ulang banyak narasi sosial tersebut justru berpotensi memunculkan ketidakadilan. Sitiran diatas menjadi pijakan posisi pemikiran Ranciere tentang celah dimana *consensus* memiliki sisi negatif. Kritik itu ingin menyebutkan bahwa *consensus* bukanlah hal yang baik, khususnya dalam berdemokrasi, karena berbahaya bagi keberagaman. Terlebih perhitungan kesepakatan yang berdasarkan jumlah melalui golongan masyarakat mayoritas tertentu berpotensi menutup kontroversi bahwa ada hal yang bisa diperdebatkan dalam kebenaran yang seolah objektif. Artinya, ada kemungkinan bahwa

mayoritas meniadakan suara minoritas untuk memperjuangkan haknya. Pikiran tentang bahwa jumlah yang terbanyak yang menentukan nasib suara yang kecil seolah menjadi hal yang lumrah, padahal prosentase tersebut dalam kerangka demokrasi justru ingin memberikan tanda bahwa tidak ada kemenangan total nan absolut yang artinya suara mayoritas menjadi tidak mutlak ketika ada prosentase kecil lain yang tidak terakomidir. *Dissensus* mengambil posisi ketidaksepakatan tersebut untuk memberikan sinyal bahwa ada distribusi keadilan yang harus dipikirkan ulang.

Disensus menjadi pusat konsep penting dalam kearnyngka berpikir Ranciere karena ingin menunjukkan ambiguitas keteraturan pada distribusi sosial sehingga tidak diterima begitu saja secara mutlak “*a dissensus is not a conflict of interests, opinions, or values; it is a division put in the “common sense”: a dispute about what is given, about the frame within which we see something as given*” (Rancière 2012) Artinya, dissensus bukanlah persoalan konflik kepentingan, opini atau nilai, tapi soal taksonomi sosial yang diterima sebagai “kebenaran umum” yang diterima dan ditelan begitu saja. Dalam soal kebudayaan pelarangan perempuan untuk keluar pada malam hari demi keselamatan dirinya, dianggap “benar” karena dapat membahayakan. Padahal dengan menerima taksonomi sosial tersebut waktu perempuan untuk produktif justru berkurang, dan waktu produktif untuk laki-laki bertambah. Alhasil, banyak jenis pekerjaan yang disediakan oleh laki-laki selama 24 jam dan tidak bagi perempuan. Runtutan tersebut menutup akses perempuan secara sosial untuk punya akses waktu lebih. Soal lain dalam perihal pembuatan prasarana publik sebut saja toilet yang memperhitungkan seolah semua pengunjung adalah laki-laki dan tak ada yang cacat, sehingga abai untuk memberikan ruang nyaman bagi ibu hamil, atau penyandang disabilitas sehingga menghalangi hak mereka untuk menikmati fasilitas publik padahal mereka juga warga negara yang turut membayar pajak. Jika ada perempuan hamil yang kebingungan untuk menyusui anaknya, yang disalahkan hampir pasti perempuannya, mengapa dia bepergian padahal dia sedang hamil. Seolah hak perempuan hilang ketika dia mengandung. Dalam soal lain yang tidak kalah pelik *dissensus* juga harus dipraktikan ketika politik identitas memberikan surplus fasilitas publik pada mayoritas, dan defisit pada minoritas layaknya institusi pendidikan yang akhirnya dibiayai pemerintah karena jumlah agama tertentu lebih banyak, dan yang sedikit mendapat perhatian. Artinya, kata publik tidak lagi mengacu pada semangat publik, tapi dia merujuk pada kelompok identitas kelompok privat tertentu. Hal ini membatalkan kata publik yang harusnya tidak mengenal identitas kelompok atau komunitas dan kerap kali membatalkan cara pandang adil secara warga negara (publik) dan bukan warga komunitas (privat).

Kebudayaan secara implisit masuk dalam pikiran demokrasi untuk menentukan sesuatu sudah pasti dianggap benar, seperti halnya sudah benar jika seorang supir adalah laki-laki, dan bukan perempuan, sudah patut apabila perempuan tidak bekerja di malam hari karena pasti bisa diganjar sebagai sah bukan perempuan baik-baik, padahal ketika itu dinyatakan sebagai konsensus kebenaran maka fasilitas kebudayaan sudah pasti tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi perempuan untuk jadi supir malam hari. Kebudayaan menghadirkan polisi kepatutan bagi perempuan untuk pantas bekerja di

waktu tertentu saja. Stigmatisasi pun akhirnya terjadi jika hal tersebut dilanggar. Ranciere menyebut hal tersebut sebagai *police* yang memberikan legitimasi tentang apa yang patut atau tidak “*the aggregation and consent of collectivities is achieved, the organization of powers, the distribution of places and roles, and the systems for legitimizing this distribution.... I propose to call it the police*” (May 2008). *Police* bukan dalam artian fisik tapi sebuah metafor dimana kita patut mempraktikkan suatu hal atau tidak agar diterima sesuai konfigurasi sosial dan distribusi kepatutan yang sah. Kepatutan menjelma menjadi rezim representasi dimana ketika seorang anak betapapun dia benar dia tidak boleh menyanggah orang tuanya yang salah, atau representasi maskulin dan feminin dimana seorang perempuan harus bisa memasak dan laki-laki tidak boleh menangis. Seperangkat peraturan ini akan mendiami ruang sosial yang sebenarnya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Laki-laki menjadi boleh untuk kasar karena dianggap cengeng ketika menangis dan perempuan harusnya melayani karena secara kebudayaan hanya dianjurkan untuk mahir di wilayah domestik.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun kerangka metodologis, meski kerap tak disarankan dalam tradisi paskastruktural, upaya penyusunan kerangka ini akan lebih merujuk pada penggunaan prinsip etika. Etika dimaksudkan agar metode yang dihasilkan dapat menuntun pada analisis struktur ketimpangan dan mampu menunjukkan kelompok yang dirugikan untuk melakukan perubahan sehingga analisis tidak berhenti pada penemuan pemaknaan. Etika yang dimaksud adalah bahwa ilmu pengetahuan harus berpihak pada yang dilemahkan agar tercipta jenis keadilan baru bagi yang dikalahkan. Alhasil, etika mengharuskan peneliti untuk bersikap kolaboratif, tidak opresif sehingga menghasilkan dunia baru yang lebih adil dan setara (Denzin and Lincoln 2018). Berdasarkan prinsip tersebut maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai tawaran alat uji ketidakberesan sosial ataupun konflik yang berada dalam praktik sastra dan kebudayaan. Runtutan metode adalah sebagai berikut.

Pertama, konsep *police* diajukan untuk menyoal bahwa ada sistem yang menginklusi dan mengeksklusi kepatutan dalam sistem sosial. Kedua, sejauh mana sistem kepatutan tersebut menghasilkan konsensus yang mengopresi masyarakat sekaligus melahirkan budaya dominatif. Ketiga, *dissensus* diajukan untuk membalik ketimpangan bahwa ada suara minoritas yang terbelenggu sehingga kekuasaan terus menerus surplus pada mayoritas dan defisit pada minoritas yang menyebabkan hilangnya ruang demokrasi yang setara. Keempat, menyatakan ruang emansipasi untuk memunculkan semangat agar menghasilkan struktur sosial baru sekaligus membatalkan keadilan semu yang terlihat seolah baik secara representasi namun tidak menyatakan kesetaraan pada yang teropresi.

Langkah-langkah tersebut dikreasikan secara metodologis dengan maksud memudahkan logika runutan analisis. Kendati demikian, setiap konsep dapat direkonfigurasi ulang namun dengan tujuan yang sama yaitu terjadinya kesetaraan dalam ruang demokrasi sastra dan kebudayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama akan menyoal dua perihal penting yang akan disorot melalauai kacamata Ranciere. Soal pertama adalah perihal kebudayaan yang penuh dengan taksonomi sosial sehingga manusia sebagai subjek sulit lepas dari kategorisasi. Sedangkan yang kedua adalah perihal sastra yang secara narasi kerap kali hanya baik sebagai representasi dan sulit memberi alternatif solusi. Alhasil, sastra hanya akrobatik sebagai gambaran namun sulit menjadi sarana pembebasan bagi yang dilemahkan.

A. *Le Partage du Sensible*, Distribusi Keputusan dan Upaya Melampaui Taksonomi Kebudayaan

Konsep lain yang terkenal dari Ranciere adalah *distribution of sensible* atau distribusi keputusan. Distribusi tersebut terjadi ketika *police* bekerja sebagai sarana keteraturan “*the police is thus first an order of bodies that defines the allocation of ways of doing, ways of being, and ways of saying, ... it is an order of the visible and the sayable that sees that a particular activity is visible and another is not, that this speech is understood as discourse and another as noise*” (Stoneman 2011) Ranciere ingin memberikan ketegasan bahwa yang bisa diterima hanya yang berlaku bagi *police* dan yang tidak masuk dalam kerangka *police* adalah ketidakaturan atau suara kebisingan, *noise*. Misalnya sudah lazim bagi keturunan tionghoa tidak ikut dalam rekrutmen tentara karena dianggap lebih mahir berdagang, keputusan ini tidak mungkin disangkal, dan apabila disangkal akan terlihat aneh, dan menjadi *noise* kebisingan. Fakta riil contohnya nyaris tidak ada warga keturunan tionghoa yang masuk dalam wilayah insitusi bersenjata dan bahkan pejabat publik. Jika disangkal pasti akan timbul peristiwa *noise* karena sulit bagi *police* mengamini jenis keputusan yang demikian.

Police bekerja demi *distribution of sensible* atau terbentuknya distribusi keputusan demi meyakinkan bahwa seperangkat persepsi hal yang diluar dirinya mampu ditampik “*the system of self-evident facts of sense perception that simultaneously discloses the existence of something in common and the delimitations that define the respective parts and positions within it*” (Rancière 2004). Distribusi keputusan dengan begitu menghadirkan kenyataan bersama yang sifatnya sangat eksklusif. Eksklusifitas itu dimana kelompok tertentu diuntungkan dan diperbolehkan sedangkan yang lain tidak diperbolehkan meski secara ideal prinsip demokrasi mengizinkan. Perempuan dipatutkan untuk bisa memasak namun tidak laki-laki karena fakta tersebut menguntungkan keluarga dari segi ekonomi karena dapat menghemat pengeluaran secara besar dan tanpa upah. Kenyataan yang berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku pada laki-laki karena yang diberi apresiasi sepatutnya adalah laki-laki karena merupakan *the breadwinner of the family*. Apabila distribusi ini dipraktikan oleh perempuan yang gemar memasak tentu saja tidak masalah tapi bagi yang tidak mencintai pekerjaan itu, atau merasa terpaksa maka akan hadir sanksi sosial sebagai contoh perempuan yang tak ideal sehingga berakibat membunuh segala potensi dirinya yang tak sesuai norma sosial. Pun bagi laki-laki yang tidak mampu bekerja di luar rumah dan menghasilkan uang akan mengalami hal yang sama yaitu kebiri sosial.

Logika kepatutan ini mengendap sebagai tatanan sosial, norma atau apapun yang diterima sebagai sebuah kebenaran dan opini umum. Konsekuensi untuk menantang kepatutan bisa berakibat bermacam-macam karena mengumpankan diri untuk siap disalahkan, *the wrong*, alih-alih dianggap sebagai upaya emansipasi dan verifikasi diri untuk berpartisipasi di wilayah yang berbeda secara kepatutan. Konsekuensi identitas tunggal adalah perilaku tidak humanis ketika hukum pun mencerabut hak-hak mereka dengan stigma *the wrong* “*the wrong- the singularity of the local argument and expression of law-is distinguished from the particularization of right attributed to collectivities according to their identity....only possible as long as its universality is separate from the naked relationship between humanity and inhumanity*” (Norval 2012). Minoritas dengan begitu sangat mungkin menjadi *the wrong* karena mereka lenyap dari diskursus identitas tunggal komunitas sehingga hak dan kepentingan mereka menjadi sah untuk tak diperhitungkan ahkan dikebiri. Sangat mungkin peristiwa tersebut terjadi sehari-hari, ketika prasyarat seorang polisi secara kultural bukanlah warga keturunan tertentu kendati dia memegang kartu tanda penduduk yang sah, atau diberikannya bantuan beasiswa pada identitas agama mayoritas tertentu yang dilegitimasi secara kultural. Dilema tersebut terjadi dan seolah sah secara kebudayaan namun nyatanya buruk secara etika publik ketika dihadapkan kepada hak publik warga negara yang hidup dalam alam demokrasi.

Upaya untuk melampaui hal tersebut tentu saja memerlukan usaha berdarah-darah karena sulit mengubah hal yang telah tertanam dan mengendap dalam arus sejarah dan kebudayaan. Pembagian kelompok ini bahkan diamini oleh Plato melalui piramida kelasnya, dimana *philosopher king* adalah satu-satunya yang mengerti tentang apa yang baik bagi semua, bukan ksatria yang hanya tahu bertempur dan memegang senjata apalagi pedagang yang hanya paham kesenangan pribadi dengan logika untung ruginya. Ranciere menyebutnya sebagai “*archipolitics, whose model is supplied by Plato, reveals in all its radicality the project of a community based on the complete realization of the arkhe of community, on its integral sensibilization, replacing without any leftover the democratic configuration of politics*” (Deranty 2010). Contoh *archipolitics* bisa dilihat ketika tentara atau polisi yang berhasrat menjadi politikus harus meninggalkan karir militernya karena senjata bukan alat berpikir yang utama. Di lain sisi sistem ini juga sekaligus memperkuat kemungkinan bahwa sistem kelas menjadi teramat rigid, pertimbangan dari kelas lain menjadi tidak penting karena hasil pembentukan sistem hirarki yang sangat ketat. Pada level paling bawah, pedagang misalnya seolah tak mengerti secuil pun tentang konsep keadilan padahal mereka setiap hari harus mempraktikkan prinsip mutualisme antara dirinya dan konsumennya.

Hirarki sosial yang ketat terus dipraktikkan secara kebudayaan untuk saling menindas dan menampik kecerdasan kelompok kecil yang seolah tak memiliki basis pengetahuan untuk memahami dunia yang dialaminya. Perempuan hingga kini masih sering dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak mungkin bisa setara dengan lelaki karena sering dikategorikan terlalu sering menggunakan perasaan yang sulit diukur kebenarannya dalam kacamata lelaki. Perihal ini juga yang membuat budaya eropa awal memandang perempuan tak lebih sebagai sistem produksi untuk melahirkan dan melayani laki-laki dengan kemampuan domestiknya. Perempuan kala itu direduksi sebagai bagian dari masyarakat yang tak memiliki bagian dalam praktik sosial yang bagi

Ranciere disebut “*le sans part – san those who have no part, to the conflict between parts of society*” (Schaap 2011)). Konsep ini juga memberikan sinyal bahwa ada bagian yang tak memiliki bagian, “*a part of those who no part*” atau “*the portion of the portionless*”. Maka Ranciere menegaskan tugas dari demokrasi adalah menentang apa yang seolah terberikan pada kelompok dan justru berpotensi mensensor kelompok tertentu didalamnya “*democracy as a form for constructing dissensus over 'the given' of public life*” (Rancière 2004) dan dalam kasus gerakan feminis awal dinggris rakyat perempuan menyuarakan gerakan *suffrogate*, dimana perempuan Inggris akhirnya bisa mendapatkan hak pilih dan didengar suaranya atas ketidakadilan yang menimpa mereka. Perempuan akhirnya dianggap mampu menyuarakan ketidakadilan yang selama ini dianggap gagap oleh pemerintah patriarkis. Terbentuknya partai *Women's Social and Political Union* menjadi gerakan yang betul-betul merombak seluruh tatanan sosial, distribusi kepatutan dan juga ‘kenormalan’ yang difabrikasi pemerintahan demi melanggengkan kekuasaannya. Peristiwa ini bisa disebut sebagai bertemunya kesadaran bahwa selama ini sebenarnya norma sosial telah dipolitisir “*for a thing to be political, it must give rise to a meeting of police logic and egalitarian logic that is never set up in advance*” (Rancière 1999). Perempuan pada masa itu menjadi subjek untuk memerdekakan dirinya, dan memunculkan dirinya sebagai subjek yang berbahaya karena siapa yang menduga perempuan yang secara kelas diguda lebih buruk, sibuk di wilayah domestik menjadi paham mengorganisir gerakan politik, menuliskannya dan memiliki visi untuk menghasilkan perubahan. Ranciere menyebut ini sebagai subjek migrant yang berbahaya bagi kekuasaan.

Perhaps the truly dangerous classes are not so much the uncivilised ones thought to undermine society from below, but rather the migrants who move at the borders between classes, individuals and groups who develop capabilities within themselves which are useless for the improvement of their material lives and which in fact are liable to make them despise material concern (Palmer and Rancière 1991)

Bagi Ranciere yang mengerikan adalah ketika buruh mengalami peristiwa transformatif kesadaran, melampaui kelasnya yang sebenarnya dikondisikan agar hanya mampu memahami materi menjadi berhasil mengabstraksikan dan mengguraikan pengalaman diskriminasinya secara jernih bahwa ini adalah penindasan. Perempuan pada masa itu juga memiliki kondisi yang sama ketika hanya disibukkan pada kegiatan domestik yang bahkan tak dibayar layaknya buruh untuk menjadi peka bahwa mereka harus melampaui kesadaran kelasnya. Emansipasi adalah wujud bagaimana perempuan kala itu memiliki kesadaran etis yang kolektif sehingga tak lagi mau dikategorikan sedemikian rendah. Kendati contoh yang diberikan pada tulisan ini tidak berlangsung pada negara yang menganut iklim demokratis namun momentum sejarah ini kurang lebih memberikan kualitas dan sifat bagaimana demokrasi harusnya memberikan ruang emansipasi demi kesetaraan.

B. Sastra Sebagai Cara Emansipasi dan Bukan Representasi

Karya sastra dan novel secara sosiologis masih penuh dengan kerangka representasi dengan menggambarkan dan memfabrikasi realita secara mimetis. Representasi dikritik karena membuat karya sastra menjadi terjebak dalam meneguhkan

norma sosial tertentu yang seolah benar dan adiluhung sehingga membungkam bahkan menutup pengalaman alternatif lain untuk hadir. Bentuk dominasi representasi adalah bagaimana karya sastra nampaknya mencitrakan dirinya untuk sesuai dengan tatanan yang ada berikut taksonomi sosialnya, seperti laki-laki disebut maskulin dengan otot yang besar, atau orang jahat yang pastinya bertubuh besar dan berbadan hitam. Belum lagi sastra terkadang diletakkan sesuai dengan gambaran suatu zaman sehingga seolah cenderung merefleksikan peristiwa maupun pengalaman sembari berupaya mendokumentasikan sejarah. Sastra dengan perpektif zaman yang politis menggambarkan sejarah melalui kerangka narasi besar namun luput membidik kerangka narasi kecil tentang beragamnya pengalaman hidup. Problem sastra berikut tradisi kritiknya bagi Ranciere dimulai karena adanya *regime of arts*, atau rezim kesenian yang bercokol dalam benak pegiat, penikmat dan kritikus sastra. Karya sastra yang ‘baik’ seolah harusnya berifat mimetis ‘meniru’ demi menawarkan representasi pengalaman sosial tertentu yang justru melanggengkan tatanan sosial, maka sulit untuk melihat ada upaya emansipasi yang harusnya memproduksi alternatif kebaruaran pengalaman. Bagi Ranciere sastra harus bersifat emansipatif bukan sekedar representatif

Emancipated "literature" has two great principles. In opposition to the norms of representative poetics, it proclaims the indifference of the form with respect to its content. In opposition to the idea of poetry as fiction, it proclaims poetry to be a specific mode of language. Are these two principles compatible? Both, to be sure, promote an art that is properly speaking an art of writing in opposition to the old mimesis of speech in action (Rancière 2011)

Demi mencerna kutipan diatas, Ranciere secara jelas ingin beroposisi dengan karya sastra yang hanya baik secara representasi dan sekedar fiksi mimetis belaka, padahal emansipasi menuntut memperlihatkan keganjilan dan cara mengujarkannya. Artinya seni menulis bukan hanya sekedar cara usang meniru realitas secara mimetik ketika dia ditindak tuturkan. Dengan begitu sastra emansipatif ingin menawarkan bahwa karya sastra betapun populer dan akrobatiknya dalam penyajian bahasanya harus keluar dari model representasi. Upaya representasi yang dimaksud adalah melihat karya sastra sebagai bangun fiksi yang secara naif ‘mimetis’ pada realitas sosial. Seperti halnya banyak novel religius yang memperlihatkan betapa salehnya seseorang sehingga mampu membahagikan seluruh istri dan anaknya. Kesalehan itu dikonversi hingga melegitimasi sah untuk memiliki istri lebih dari satu dalam beberapa novel agamis tertentu. Representasi seperti ini terlihat amat puitis, dalam artian sangat mampu mengaduk imajinasi seseorang tentang harapan memiliki seorang suami yang saleh sebagai prasyarat hidup untuk bahagia. Padahal tidak ada korelasi positif nan determinis tentang kesalehan dan kebahagiaan, apalagi kerelaan seorang perempuan untuk dimadu. Celaknya, sering kali penggambaran biner tentang representasi betapa nikmatnya hidup bagi yang telah menikah dengan yang saleh dan petaka bagi yang tidak memiliki pasangan saleh terus direproduksi. Cara penuturan sastra berkontribusi dalam melegitimasi bahwa karya secara mimetis adalah tiruan dari dunia nyata dan memberikan sensasi bahwa wacana dominan yang dibawanya adalah kebenaran yang hakiki. Berbeda dengan hal tersebut, Ranciere justru melihat realitas justru kontradiktif

dan menyediakan beragam alternatif. Disebut alternatif nan emansipatif banyak pengalaman lain yang kaya bisa dihadirkan meski terkesan ganjil dan tidak diterima. Karya sastra emansipatif bagi Ranciere dengan begitu menunjukkan kontradiksi antara bayangan puitis suatu karya dengan isinya dan melihat karya sastra bukan sekedar fiksi tapi juga cara bertindak tutur tentang persoalan 'kenormalan' tertentu.

Ranciere secara rigid menganalisis karya sastra melalui bukunya "*Mute Speech: Literature, Critical Theory, and Politics*" (2011) yang secara kesinambungan merujuk pada persoalan rezim kesenian dimana estetika acap menjadi kering karena hanya memproduksi ulang kenyataan demi representasi yang mekanis.

The aesthetic regime of the arts was initially the breakdown of the system of representation, that is to say of a system where the dignity of the subject matter dictated the dignity of genres of representation (tragedy for the nobles, comedy for the people of meagre means; historical painting versus genre painting; etc.). Along with genres, the system of representation defined the situations and forms of expression that were appropriate for the lowliness or loftiness of the subject matter. The aesthetic regime [49] of the arts dismantled this correlation between subject matter and mode of representation. This revolution first took place in literature: an epoch and a society were deciphered through the features, clothes, or gestures of an ordinary individual (Balzac); the sewer revealed a civilization (Hugo); the daughter of a farmer and the daughter of a banker were caught in the equal force of style as an 'absolute manner of seeing things' (Rancière 2004)

Kata kunci dari kutipan diatas adalah *lowliness or loftiness of the subject matter* dimana sesuatu hanya patut diganjar pantas jika direpresentasikan sesuai dengan kepatutannya. Aristokrat harus diagungkan, dan kaum kecil harus direndahkan atau penjahat harus digamabarkan demikian buruk dan banal sedangkan kesatria harus diglorifikasi habis-habisan. Padahal bukan tidak mungkin aristokrasi menghadirkan kekerasan atau seseorang menjadi jahat karena memiliki alasan yang kuat karena dihipit oleh tekanan kekuasaan. Karya menjadi dangkal dan acap baik secara representasi yang mekanis. Maka Ranciere menunjukkan banyak sebenarnya karya sastra yang berani adalah yang mampu untuk mempertontokan keganjilan hidup sehingga hal kecil pun nyatanya memiliki kekayaan pengalaman batin yang tidak terduga dan tak terbayangkan, persis seperti karya Balzac, Hugo dan Flaubert yang telah secara revolusioner meninggalkan pola representasi demi menuju ekspresi pengalaman yang beragam.

Pada kritik sastra, Ranciere sebenarnya ingin mendaratkan konsep – konsepnya yang penuh semangat kesetaraan agar lebih mudah dicerna, persis seperti ketika dirinya berbicara demokrasi. Banyak karya sastra yang digunakan Ranciere sebagai contoh, namun demi mempermudah mencerna pemikirannya contoh yang digunakan adalah dua dua karya besar dari penulis Victor Hugo, *Notre Dame of Paris* dan *Madame Bouvary* karya Gustave Flaubert karena terbilang lebih akrab bagi penikmat sastra klasik populer. Pada *Notre Dame of Paris* karya sastra menajdi hidup karena ditunjukkan bahwa bangunan yang teramat megah bagi orang saleh menunjukkan betapa kontradiktifnya relasi antar tokoh, seperti Frollo yang teramat patuh dan religius justru jatuh cinta pada perempuan *gypsi* bernama Esmeralda yang merupakan ancaman bagi hukum. Peristiwa

yang terjadi didalam novel benar-benar diluar dugaan. Frolo yang seorang pemuka agama nyatanya diam-diam menghasrati perempuan gipsi yang dimasa itu diidentikan dengan penyihir dan bagian dari masyarakat yang tidak bisa diatur oleh negara. Padahal kala itu model penggambaran atau representasi negara-agama dan cinta terlarang adalah tabu, apalagi ada aparat yang mendambakan *femme fatale* macam Esmeralda. Di lain sisi rakyat prancis yang juga menderita nyatanya juga tidak memiliki empati kepada Quasimodo yang tak lain adalah pria buruk bungkuk yang selalu diolok olok ketika pawai padahal seluruh warga prancis berhutang padanya karena dialah yang satu-satunya orang yang membunyikan bell katedral. Sedangkan pada Madame Bovary, pengalaman Emma yang menikah dengan orang kaya dan seorang dokter yang berstatus sosial tinggi nyatanya tak mampu membuatnya bahagia, tak seperti impian orang pada umumnya bahwa menikahi lelaki kaya adalah prasyarat kebahagiaan. Alhasil pada Madame Bovary pembaca justru diajak untuk melihat dunia yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan secara fiksional, karena sulit menerima representasi perempuan seperti Emma pada zaman seperti itu bahkan sangat mungkin hingga sekarang karena bisa saja disebut tak tahu diuntung. Sebagai alur proses penjelasan yang lebih rigid, maka setidaknya tiga konsep utama yang diajukan oleh Alison Ross dalam menyoal karya menggunakan beberapa konsep berikut seperti *expressivity*, *literarity* dan *mute speech* untuk menngkofigurasi konsep – konsep analisis sastra Ranciere (Deranty 2010)

Konsep *expressivity* tertuang pada bab awal gagasan Ranciere untuk pindah dari logika representasi menuju pentingnya ekspresi sebuah karya. *Expressivity* mudahnya adalah sebuah kata tidak mungkin memiliki makna absolute dan definitif, sehingga seharusnya tidak mungkin melihat kata memiliki relasi pasti dengan konsekuensi tindakan "*ways of doing, ways of being and ways of speaking*" (Deranty 2010). Maka jika urutan skenario menjadi mudah tertebak itu adalah ulah representasi. Seperti halnya kata 'dapur' yang seolah mengasosiasikan dirinya dengan perempuan yang tahu cara memasak, mahir dan mampu menjelaskan apa saja yang didalamnya. Ini adalah representasi sehingga *expressivity* mengambil jarak dengan menguji dimana kenafian bahasa puitis yang ingin merepresentasikan pengalaman sosial tanpa memberikan alternatif pengalaman yang beragam tentang paradoks kehidupan. Ekspresi karya dengan bahasa yang memukau bisa saja mengecoh karena dengan pilihan kata yang akrobatik terkadang pembaca bisa saja tidak mendapat informasi baru namun sekedar terpukau pada pilihan kata sehingga justru melegitimasi representasi kekuasaan didalam struktur sosial bahwa dapur secara konsensus adalah wilayah perempuan dan tak ada lelaki yang mahir di dapur dalam karya sastra. Dalam kenyataanya ternyata tak begitu banyak ahli masak yang dikenal justru juru masak laki-laki yang kini justru mendominasi persis seperti yang terjadi dalam acara tv ataupun kanal digital populer lainnya kini. Artinya, kemampuan membahasakan pengalaman dunia sebenarnya tidak betul-betul menggugah pengalaman dunia yang kompleks namun justru memunculkan hirarki sosial khas konsensus representasi. Ranciere mencotohkan dalam karya Hugo, Notre Dame de Paris sebagai berikut

Representative poetry was composed of stories submitted to principles of concatenation, characters submitted to principles of verisimilitude, and discourses submitted to principles of decorum. The new poetry-expressive poetry-is made of sentences and images, sentence- images that have inherent value as manifestations of poeticity, that claim a relation immediately expressive of poetry, similar to the relation Notre-Dame de Paris poses between the image sculpted on a column, the architectural unity of the cathedral, and the unifying principle of divine and collective faith (Rancière 2011)

Representasi yang kering akan pengalaman tak ubahnya kepatuhan dimana cerita menjadi mudah tertebak urutannya, karakter dianggap baik karena menganut kebenaran normatif tertentu, dan wacana selalu sesuai dengan model kepantasan-kepantasan tersebut. Contoh yang paling mudah adalah Cinderella, tentang bagaimana seorang perempuan yang baik adalah yang mau menerima apa adanya sehingga hanya keajaiban dan pria kaya raya seperti pangeran yang mampu menyelamatkannya. Kebenaran ini menghambat perempuan untuk mengajukan dirinya sendiri sebagai agen perubahan karena masih berharap pada kuasa laki-laki. Cerita tersebut diam-diam memberikan hirarki lebih tinggi bagi laki-laki untuk kaya dan tampan dan perempuan sepatutnya memperebutkannya. Perempuan dengan begitu dituntut untuk berkompetisi dengan perempuan lain. Hal ini terus terjadi, dan direproduksi dalam berbagai macam representasi, seperti yang sekarang terjadi ketika seorang suami direbut perempuan lain, maka perempuan perebut itu disebut pelakor, namun tak pernah ada sebutan negatif bagi laki-laki yang mau digoda walaupun perselingkuhan terjadi berkat persetujuannya juga. Pelakor apabila dinarasikan dalam bentuk cerita sudah bisa tertebak representasi dan akhir penceritaannya, tak baik, tapi hal itu tidak selalu berlaku bagi laki-laki. Urutan yang tertebak, *concatenation*, serta kebenaran bahwa perempuan berkompetisi, *versimilitude*, sekaligus disemenasikan wacana bahwa benar perempuan mampu menjadi terhormat jika suaminya kaya, *decorum*, menjadi representasi yang sebenarnya melanggengkan kekuasaan laki-laki tanpa perempuan sadari. Taksonomi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan menjadi artikulasi yang dibatinkan pembaca secara implisit dan lalu diterima untuk dipraktikkan sebagai kebenaran tunggal.

Di lain sisi, Notre Dame sebagai karya sastra menghindari hal tersebut dengan berbicara kontradiksi melalui imajinasi yang beragam. Sehingga kalimat selalu dibawa keimaji yang liar tentang pilar dan patung, kesalehan dan iman kolektif. Notre Dame dalam artian lain, ingin menggugah imajinasi-imajinasi tentang hidup yang beragam, bahwa pemuka agama tak sepenuhnya saleh, bahwa perempuan juga memiliki dualitas tak sepenuhnya buruk, dan rakyat Prancis yang juga naif dan kemiskinan tak lantas membuat mereka bersimpati pada Quasimodo. Sehingga keharusan representasi yang diucapkan tentang hitam-putihnya kehidupan menjadi hilang dan Rancière justru ingin menunjukkan potensi kontradiksi yang dia sebut sebagai “*it is the loss of representative proportions and proprieties...each of realism: everything is now on the same level, the great and the small, important events and insignificant episodes,.. Everything is equal, equally representable*” (Rancière 2007). Bagaimana memberikan makna pada katedral yang begitu suci tapi juga begitu buruk karena membiarkan kesengsaraan, atau Frollo seorang pria terhormat yang terkesan baik pada Quasimodo

tapi juga memiliki imajinasi untuk bercinta dengan Esmeralda, seorang gipsy molek. Pemaknaan secara definitif dan hirarki tentang baik buruk menjadi batal, makna menjadi tertunda dan pembaca dihadapkan pada semua hal yang tak terduga. Langkah poetic bagi Ranciere menjadi “*nothing more than the continual dissolution of representation, the act of self-exhibition, the exhibition of an empty intention at the expense of every object*”(Rancière 2011) yang merupakan upaya membatalkan representasi mutlak.

Ekspresi atau *expressivity* membuka potensi hadirnya konsep kedua yaitu literarity dimana emansipasi imajinasi menjadi muncul demi hadirnya kesetaraan dimana narasi tidak lagi didikte layaknya tokoh selalu menempati fungsi tertentu di dalam masyarakat.

By confusing the destination of living speech, writing confuses this relationship between ways of doing, ways of being, and ways of speaking whose harmony constitutes, according to Plato, the community animated by its living soul. I suggest we give this disorder the generic name of literarity [litterarittfj]. It constitutes a graver challenge for thought, perhaps, than the disorders of poetic fiction and the unhealthy simulacra it places (Rancière 2004)

Literarity menantang segala bentuk taksonomi sosial sekaligus penamaan strukturasi sehingga konsep ini bahkan akan teramat menantang secara ide, dimulai dari mengacak tatanan puitik sebuah fiksi dan juga penggambaran baik buruk selalu diletakkan. Sebagai contoh dalam dongeng nusantara seperti Banyuwangi bisa dilihat bagaimana tokoh Sri Tanjung yang dituduh berselingkuh oleh suaminya Sidopekso, akhirnya membuktikan kesuciannya dengan merubah air yang keruh dan amis menjadi harum. Bagaimana menentukan sikap Sri Tanjung, imaji dia sebagai istri yang patuh ada karena dia bisa saja berselingkuh dengan Raja, karena siapa yang tak suka dinikahi pria kaya, tapi itu tidak dilakukannya karena dia cinta pada suaminya. Disebut cinta dan patuh pun tidak, karena begitu dia merubah wangi sungai dia sekaligus menghukum suaminya karena tak mungkin suaminya menebus dosanya pada istrinya yang meninggal demi dirinya. Artinya dalam pengalaman hidup hirarki bisa saja terbalik, tapi hidup pun kadang tak sehitam putih yang direpresentasikan seolah baik dan buruk adalah biner kepastian. Literarity dengan begitu adalah upaya untuk “bangun” dari cengkraman struktur kepatutan sosial dan mengupayakan hadirnya kesetaraan. Ross pun menerangkan maksud *literarity* bagi Ranciere ketika kata dibanjiri berbagai macam makna yang memungkinkan 1) melampui penamaan 2) melampui prasyarat tentang apa yang dibutuhkan dalam pemaknaan kehidupan 3) melampui sistem komunikasi yang melegitimasi aturan sosial (Deranty 2010). Kematian Sri Tanjung bisa disebut kepatuhan karena Sri Tanjung tak memilih serong bahkan tak melawan suaminya, disisi lain juga tidak sepenuhnya patuh karena kematiannya membuktikan kezaliman suaminya padanya sekaligus menelanjangi aturan sosial bahwa patuh pun nyatanya ganjarannya demikian tragis. Tak satupun penamaan dan pemaknaan mutlak terjadi dalam peristiwa ‘bunuh diri’nya.

Madame Bouvary juga berupaya mengekspresikan bahwa tidak ada kaitannya menikahi dokter kaya raya dengan kebahagiaan hidup. Di lain sisi menjalin *affair* dengan pria lain pun tidak memberinya kebahagiaan dan malah menuntunnya kepada kematian. Emma sang tokoh perempuan bunuh diri setelah beberapa kali berselingkuh dari Charles doctor yang hingga akhir hayatnya tetap mencintai istrinya. Representasi ideal nan normatif diacak-acak oleh pengarang dengan gaya penulisan dan penceritaannya yang mengekspresikan bahwa ada kontradiksi dan ketidak sepakatan tentang korelasi bahwa kekayaan selalu membawa kebahagiaan, superior maskulinitas tampan, mapan dan kekayaan nyatanya tak selalu bersanding dengan kecantikan. Alih-alih ingin memberikan representasi perempuan yang akhirnya mendapatkan karma, nyatanya diujung cerita yang sangat terpuak justru Charles, suami sahnya. Bagaimana mengkategorikan pengalaman Emma ini? Tentu saja ini membuat, Flaubert menjadi pengarang yang ingin menyoal tentang paradoks pengalaman hidup yang membuka seluruh pengalaman sekaligus motivasi dan alasan tindakan karakter yang membatalkan hidup pada ketegorisasi ideal tertentu, tak sepenuhnya buruk pun tak sepenuhnya baik tapi sepenuhnya-penuhnya imajinasi.

When Emma falls for Rodolphe, she perceives little gleams of gold about his pupils, smells a perfume of lemon and vanilla, and looks at the long plume of dust raised by the stagecoach. And when she first falls for Leon, "weeds streamed out in the limpid water like green wigs tossed away. Now and then some fine-legged insects alighted on the tip of a reed or crawled over a water-lily leaf. The sunshine darted its rays through the little blue bubbles on the wavelets that kept forming and breaking." This is what happens: "little blue bubbles" on wavelets in the sunshine, or swirls of dust raised by the wind. This is what the characters feel and what makes them happy: a pure flood of sensations (Rancière 2008)

Alih alih ingin mendokumentasikan pengalaman menyedjarah yang membantu dengan mengkonservasinya melalui upaya representasi, Flaubert justru menunjukkan bahwa Emma mengidamkan hal-hal yang tidak diduga yang jauh dari pengalaman pernikahannya yang hambar bersama suaminya. Wewangian serupa lemon dan vanilla, debu dan hal-hal remeh yang justru membuatnya bahagia ketika bersama Rodolphe. pernikahannya yang kaku dan kering bersama suaminya yang seorang dokter membuatnya tak mengalami pengalaman cinta yang menggebu. Pembaca pasti marah karena Emma tak merepresentasikan perempuan yang harusnya bersyukur telah hidup berkecukupan dan memiliki status sosial yang tinggi. Namun bukankah begitu pengalaman hidup yang realistis yang kerap kali tak "adil", Emma punya argumen yang dihasilkan melalui pengetahuannya sendiri, tentang dirinya yang otentik dan hal yang dia ketahui "*a declaration of belonging to the community that specifically counts the uncounted. ... answer no protocol and no definite apprenticeship (emancipation), but adjust the unlimited space of new paths ... between material places and symbolic places, between names and bodies, conditions and knowledge*" (Hunt et al. 1996) Sebagai contoh untuk mempermudah seseorang yang sangat saleh akan melihat pakaian mini adalah budaya barat padahal itu adalah cara mereka untuk menikmati matahari dimana di musim dingin tubuh mereka akan dibalut dengan pakaian yang lebih tebal dari

orang saleh pada umumnya. Pun sebaliknya ketika menutup badan pada tradisi agama tertentu dianggap represi padahal itu cara menghormati diri sendiri. Contoh ekstrim dibuat tentunya untuk mempermudah sekaligus menjelaskan kenapa Emma begitu mengagumi hal-hal kecil yang tidak dipahami oleh suaminya sendiri yang memiliki basis pengetahuan berbeda namun tidak diutarakan.

Tentu saja ini bukan hal yang mudah namun harus ditempuh. Madame Bouvary tak melulu sensual dan seksual tapi segala yang pengetahuan yang menyejarah tentang dirinya. Pengetahuan itu tak mungkin analog dengan suaminya, yang tak paham dengan hal remeh yang disukainya yang tal terbahasakan. Pada level ini konsep *literarity* menyuarkan alternatif pengalaman lain yang teramat argumentatif untuk dikurung dalam bahasa mutlak.

Konsep ketiga adalah *mute speech* yang ditujukan agar sastra menjadi lebih demokratis dan setara dengan cara memberikan ruang pada suara yang dipinggirkan, "*mute speech*" designates the fundamental character of the different species of literature in the modern age of equality and democracy (Deranty 2010)) dimana suara yang dibungkam, dan tidak diperhitungkan untuk mengambil bagian dalam wacana yang dominatif untuk mengatur ulang distribusi kepatutan. *Mute speech* terjadi karena menganggap pengetahuan yang lain adalah 'lelucon', sehingga mewajibkan kelompok yang saling acuh untuk mengakui jenis kecerdasan masing-masing sebagai *the new relation between two ignorant people who recognize each other from that point on as intelligent beings. And this new relation undoes the stultifying relation of intellectual instruction and moral education* (Ranciere 2011). Hal ini bukan tak beralasan ketika orang menjadi acuh dan membungkam pengetahuan kelompok lain karena *speech* dalam tradisi intelektual khas Aristotelian menganggap ada memang beberapa golongan orang yang tak mengerti cara membahasakan pengalaman dan pengetahuannya khususnya bagi kelompok yang secara hirarkis dibawah.

There is no place for discussion with the plebs for the simple reason that plebs do not speak. They do not speak because they are beings without a name, deprived of logos-meaning, of symbolic enrollment in the city. Plebs live a purely individual life that passes on nothing to posterity except for life itself, reduced to its reproductive function. Whoever is nameless cannot speak. (Rancière 2010)

Dengan kata lain *plebs*, orang biasa, atau *le pueple* dalam bahasa prancis, merupakan orang yang tak memiliki posisi apapun untuk mengutarakan dirinya dalam skema sosial. Parahnya mereka disebut bukan subjek yang berbahasa, apa yang mereka ucapkan hanyalah gumaman dan bukan pengetahuan. Lebih buruk lagi karena *le pueple* tak memiliki bahasa untuk mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya kecuali ekspresi sedih atau bahagia, tak ubahnya seperti hewan. Kelompok ini adalah kelompok yang salah, *the wrong*, atau *plebs* yang tak dihitung sebagai hal yang penting dalam distribusi sosial sehingga hanya diambil sisi reproduksinya. Seorang petani dianggap tak mengerti cara berococok tanam oleh sarjana pertanian, namun hitungan mereka ternyata lebih baik ketika diterapkan di lahan pekerjaan karena penggunaan sistem tradisional

tidak merusak alam dan mementingkan ekosistem ketimbang percepatan kapital yang merusak ritus kegiatan. Pengetahuan tradisional menjadi seolah lebih buruk.

Dalam karya sastra banyak tokoh karakter dikorbankan sebagai *the wrong*, tak perlu diperhitungkan hanya sebagai pelengkap cerita tanpa digali pengetahuannya khususnya bagi karya yang sekedar mimetis dan representatif. Perempuan kerap menjadi *the wrong* dalam karya sastra karena dianggap tak bisa membahasakan pengalamannya, yang ada hanya ikut pada narasi besar. Kerap kali perempuan menjadi piala bagi pemenang yang seolah penggambaran normal dimana *the hero gets the girl*. Ini karena perempuan adalah *the wrong*, mereka pantas diperlakukan seperti itu karena mereka tak memiliki pengetahuan tak bisa membahasakan pengalamannya secara runtun argumentatif dan kuat. Suaranya kadang tidak dihitung karena dianggap *noise*. Hingga pada era kini sulit untuk menemukan tokoh perempuan, sebutlah dalam narasi film *superhero* perempuan yang mampu mengambil keputusan namun hanya jadi *supplemen* aksesori saja hanya karena budaya memahami mereka sebagai yang tak berbahasa padahal selama ini bagaimana laki laki berkomunikasi dengan perempuan.

It is the readers of novels to whom he is showing that the misfortune of his heroes and heroines consists entirely in reading novels; he even shows that the most moral of novels would not be able to improve the situation-neither his writing nor any writing in words could... The democratic disease and literary performance have the same principle, namely the life of the mute-loquacious letter, the democratic letter that upsets any ordered relation between the order of discourse and the order of social conditions. (Rancière 2011)

Kutipan diatas ingin mengucapkan bahkan tak jarang tokoh utama yang terkesan *epic* justru dimatikan, karena dianggap mengancam jika dimenangkan. Pesan yang disampaikan justru menghambat situasi untuk berubah, dan sebenarnya bukan hanya soal itu, kemenangan mereka menjadi tabu karena memiliki daya demokratis untuk membuka dan membuat hidup suara yang bising untuk dibisukan. Padahal tindakan tokoh yang dibisukan bisa menunjukkan dimana sebenarnya kemampuan novelis dalam melihat masalah hidup untuk kemudian menyuarakan dan mengubahnya agar terlihat ada struktur sosial baru sekaligus memberikan harapan pada penikmat karyanya. *Mute speech* selain menunjukkan adanya suara yang dibungkam juga sekaligus ingin memberikan peluang untuk merayakan pengalaman dan pengetahuan yang selama ini dipinggirkan untuk muncul jadi sistem tanda yang harus diperhitungkan pula. Fokus pada *mute speech* memberikan tekanan bahwa suara yang dipinggirkan tak boleh dibisukan.

KESIMPULAN

Serangkaian konsep gagasan Ranciere tentang *equality* dapat diletakkan sebagai upaya untuk mendistribusikan *social justice*. Poinnya tentang konsep *disensus* untuk menolak model konsensus yang dapat mengabsenkan kepentingan publik dan minoritas tentunya juga tidak hanya aplikatif dalam pemikiran politiknya tapi juga sastra dan budaya. *Dissensus* mengisyaratkan bahwa demokrasi memang tidak memungkinkan

adanya konsensus final karena kekuasaan tidak berlaku absolut dalam alam demokrasi, sehingga suara yang tercecer di dalam konsensus kekuasaan harus direkonfigurasi ulang agar menghasilkan kehidupan publik yang bermutu bagi setiap warga negara, pun sastra dan budaya. Pikiran demokrasi dengan begitu adalah upaya untuk terus mendengarkan dan mendistribusikan keadilan yang diimajinasikan bersama hingga tidak ada yang tercecer. Tak pernah *final*, karena memang begitu sejarah dan pikiran tentang keadilan didalilkan. Hal ini dimungkinkan karena setiap orang mampu mengartikulasikan pengalaman ketidak adilannya agar dapat direspon dalam politik.

Pada karya sastra, khususnya konsep *mute speech*, Ranciere juga ingin menunjukkan bahwa suara-suara yang terbungkam dalam karya harusnya bisa diorkestrasikan, disuarakan dengan cara yang ekspresif sehingga pengalaman mereka menjadi hal penting dalam penceritaan dan bukan sekedar aksesori pendukung tokoh baik atau tokoh jahat. Pola penceritaan yang biner hanya menjadikan karya bagus sebagai representasi namun tidak menawarkan pengalaman sosial yang beragam bahkan alternatif masyarakat sosial baru. Padahal karya sastra hendak memproduksi ulang kenyataan realitas sosial dengan cara yang kreatif bukan malah mereduksi dan mereproduksi mejadi pengalaman segelintir tokoh, atau pespektif dominan sesuai wacana konsensus dominan. Karya sastra harus mampu menjadi sistem puitik yang ekspresif dan tidak sekedar representatif. Alur yang yang mudah tertebak dalam runtutan cerita dan penceritaannya adalah ciri representasi. Bukankah karya sastra harus mampu mengaduk-ngaduk pengalaman sosial yang secara realitas sosial memang pelik nan ganjil dan tidak hanya sekedar ada perilaku buruk dan baik yang amat jelas. Hanya dengan keluar dari moda representasi, karya sastra bisa menawarkan keberagaman, kesetaraan dan juga tawaran- tawaran alternatif dalam hidup sebagai pengalaman batin yang menyegarkan imajinasi.

Dalam sistem kebudayaan, Ranciere melihat distribusi kepatutan, *le partage du sensible*, sebagai moda pengatur sosial yang secara tidak langsung berkontribusi dalam penyusunan struktur sosial. Kepatutan itu diterima sebagai konsep kebenaran namun jika dibongkar sehingga dapat terlihat dimana sebenarnya bentuk-bentuk dominasi menjadi penghalang bagi minoritas untuk tumbuh dalam peradaban. Tak sedikit pula sistem kebudayaan yang hirarkis menjadi modal tafsir dalam melihat bagaimana keadilan justru menjadi begitu represif bagi yang mendewakan demokrasi. Penasbihan pada kelompok yang berbeda selalu dianggap salah, *the wrong*, alhasil mereka selalu tidak memiliki posisi apapun dalam kebudayaan. Ranciere menolak struktur objektif yang mencengkeram setiap orang untuk tumbuh dan memiliki akses kebudayaan. Dengan menunjukkan posisi kritisnya dalam kebudayaan, Ranciere ingin mengingatkan bahwa individu dan masyarakat harus mampu melampui seagala taksonomi budaya, dan hanya dengan begitu mereka mampu pindah dari kesadaran yang involutif menuju kesadaran yang lebih emansipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K, and Yvonna S. Lincoln. 2018. "The SAGE Handbook of Qualitative Research. Fifth Edition." SAGE Publication.
- Deranty, Jean Philippe. 2010. Jacques Ranciere: Key Concepts Jacques Rancière: Key Concepts.
- Hunt, Lynn, Jacques Ranciere, Hassan Melehy, and Hayden White. 1996. "The Names of History: On the Poetics of Knowledge." *Contemporary Sociology*.
- May, Todd. 2008. *The Political Thought of Jacques Rancière: Creating Equality* The Political Thought of Jacques Rancière: Creating Equality.
- Norval, Aletta J. 2012. "Writing a Name in the Sky: Rancière, Cavell, and the Possibility of Egalitarian Inscription." *American Political Science Review*.
- Palmer, Bryan D., and Jacques Rancière. 1991. "The Nights of Labor: The Workers' Dream in Nineteenth-Century France." *Labour / Le Travail*.
- Ranciere, J. 2011. *Artforum International The Ignorant Schoolmaster*.
- Rancière, Jacques. 1999. *Disagreement: Politics and Philosophy*. U of Minnesota Press.
- . 2004. *Atopia. The Flesh of Words : The Politics of Writing*.
- . 2004. "The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible, Trans. by Gabriel Rockhill (London and New York." *Continuum*: 13–14.
- . 2007. "The Future of the Image." *Parallax*.
- . 2008. "Why Emma Bovary Had to Be Killed." *Critical Inquiry*.
- . 2010. *Jacques Rancière : Education, Truth, Emancipation* Jacques Rancière : Education, Truth, Emancipation.
- . 2011. *Mute Speech: Literature, Critical Theory, and Politics*. Columbia University Press.
- . 2012. "Who Is the Subject of the Rights of Man?" In *Wronging Rights?: Philosophical Challenges for Human Rights*,.
- Schaap, Andrew. 2011. "Enacting the Right to Have Rights: Jacques Rancière's Critique of Hannah Arendt." *European Journal of Political Theory*.
- Stoneman, Ethan. 2011. "Appropriate Indecorum Rhetoric and Aesthetics in the Political Theory of Jacques Rancière." *Philosophy and Rhetoric*.